

BIMBINGAN DAN KONSELING LINTAS BUDAYA

Oleh Mamat Supriatna

(PPB – FIP – UPI)

A. TUJUAN

Secara umum modul pelatihan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman, sikap positif, dan keterampilan dasar peserta dalam membantu individu melalui bimbingan dan konseling lintas budaya.

Secara khusus, setelah mengikuti pelatihan tentang bimbingan dan konseling lintas budaya, para peserta diharapkan dapat:

1. Memahami ragam budaya yang dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok.
2. Memahami dan menunjukkan sikap penerimaan terhadap perbedaan sudut pandang subjektif antara konselor dengan konseli.
3. Peka, toleran, dan responsif terhadap perbedaan budaya konseli.
4. Menerapkan prinsip-prinsip konteks lintas budaya dalam bimbingan dan konseling.

B. RUANG LINGKUP MATERI

Pokok-pokok materi pelatihan meliputi sebagai berikut:

1. Konsep konseling lintas budaya; latar belakang, pengertian, dan pendekatan konseling lintas budaya.
2. Model konseling lintas budaya: model berpusat pada budaya (*culture centered model*), model integratif (*integrative model*), dan model etnomedikal (*ethnomedical model*).
3. Identitas dan komponen-komponen perbedaan budaya: pengertian budaya dan komponen-komponen perbedaan budaya.
4. Masukan unsur lintas budaya dalam rancangan dan implementasi program bimbingan dan konseling.
5. Strategi bimbingan dan konseling berwawasan kebangsaan sebagai salah satu alternatif bagi implementasi bimbingan dan konseling lintas budaya.

C. STRATEGI PEMBELAJARAN

Strategi utama untuk mengembangkan kompetensi dan mengkaji materi pelatihan ini meliputi:

1. *Ice Breaker* tentang perubahan paradigma melalui pengembangan persepsi dan kebiasaan;

2. Dialog interaktif;
3. Demonstrasi;
4. Analisis kasus lintas budaya dalam konseling;
5. Refleksi diri.

D. EVALUASI

Untuk mengetahui pencapaian tujuan pelatihan, instruktur mengadakan evaluasi melalui 2 kegiatan pokok, yaitu evaluasi tertulis dan melalui simulasi bimbingan dan konseling sebaya disertai dengan refleksi. Evaluasi tertulis dilakukan bersamaan dengan materi BK lainnya (setelah semua materi bimbingan disampaikan), sedangkan prosedur simulasi dan refleksi dilakukan dengan:

1. Meminta masing-masing peserta yang berperan sebagai guru, terbimbing dan pengamat untuk mengungkapkan pengalamannya dalam bersimulasi.
2. Pelatih meminta tanggapan dari para peserta lain tentang kesesuaian antara konsep dan simulasi yang telah dilakukan.
3. Pelatih meminta peserta untuk mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul dalam menggunakan bimbingan dan konseling lintas budaya serta mengeksplorasi cara mengatasinya.
4. Pelatih memberi balikan kepada peserta tentang keberhasilan yang dicapai oleh peserta dalam pelatihan.

E. URAIAN MATERI

1. Konsep Konseling Lintas Budaya

a. Latar Belakang Konseling Lintas Budaya

Isu-isu tentang antar atau lintas budaya yang disebut juga multibudaya meningkat dalam dekade 1960-an, yang selanjutnya melatari kesadaran bangsa Amerika pada dekade 1980-an. Namun, rupanya kesadaran itu disertai dengan kemunculan kembali sikap-sikap rasialis yang memecah-belah secara meningkat pula (Hansen, L. S., 1997:41). Hal ini menjelaskan pandangan, bahwa dibutuhkan pendekatan baru untuk kehidupan pada abad-21, baik yang melingkup pendidikan bagi orang biasa maupun profesional dalam bidang lintas serta keragaman budaya. Pendidikan yang dimaksud hendaknya menegaskan dimensi-dimensi keragaman dan perbedaan. Dengan kata lain, kecenderungan

pendidikan yang berwawasan lintas budaya sangat diperlukan dalam kehidupan manusia abad-21.

Dasar pertimbangan yang melatari sangat pentingnya wawasan lintas budaya dalam bidang pendidikan, terutama dipengaruhi oleh globalisasi dan modernisasi yang sangat pesat, yang antara lain ditandai dengan kecenderungan besar perubahan kehidupan sebagai berikut. *Pertama*, kehidupan demokratisasi yang ditunjukkan dengan kesadaran akan hak asasi yang semakin meningkat pada setiap lapisan masyarakat. *Kedua*, transparansi sebagai dampak dari perkembangan jenis media dan informasi yang semakin beragam, yang menuntut kemampuan memproses dan memproduksi secara cerdas. *Ketiga*, efisiensi dalam pemanfaatan waktu yang menuntut manusia untuk pandai membuat keputusan dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan penaksiran serta penerimaan risiko dari setiap keputusan secara bertanggungjawab.

Dalam bidang konseling dan psikologi, pendekatan lintas budaya dipandang sebagai kekuatan keempat setelah pendekatan psikodinamik, behavioristik dan humanistik (Paul Pedersen, 1991). Banyak pengarang menulis tentang konseling lintas budaya sering dari populasi minoritas mereka sendiri, untuk menyebut jalan pergerakan dari suatu yang menegaskan landasan pengetahuan Eurosentrik, yang sebelumnya melingkupi landasan pengetahuan pluralistik. Pada akhirnya, pandangan lintas budaya ditandai oleh pendekatan holistik untuk membantu dan penyembuhan, terfokuskan pada kelompok dan keluarga alih-alih pada individu, dan menggunakan sudut pandang yang integral alih-alih yang linear.

Suatu masalah yang berkaitan dengan lintas budaya adalah bahwa orang mengartikannya secara berlain-lainan atau berbeda, yang mempersulit untuk mengetahui maknanya secara pasti atau benar. Dapat dinyatakan, bahwa konseling lintas budaya telah diartikan secara beragam dan berbeda-beda, sebagaimana keragaman dan perbedaan budaya yang memberi artinya.

b. Pengertian Konseling Lintas Budaya

Definisi-definisi awal tentang lintas budaya cenderung untuk menekankan pada ras, etnisitas, dan sebagainya; sedangkan para teoretisi mutakhir cenderung untuk mendefinisikan lintas budaya terbatas pada variabel-variabelnya (Ponterotto, Casas, Suzuki, dan Alexander, 1995; Locke, 1992; Sue

dan Sue, 1990). Namun, argumen-argumen yang lain menyatakan, bahwa lintas budaya harus melingkupi pula seluruh bidang dari kelompok-kelompok yang tertindas, bukan hanya orang kulit berwarna, dikarenakan yang tertindas itu dapat berupa gender, kelas, agama, keterbelakangan, bahasa, orientasi seksual, dan usia (Trickett, Watts, dan Birman, 1994; Arrendondo, Psalti, dan Cella, 1993; Pedersen, 1991).

Dilihat dari sisi identitas budaya, konseling lintas budaya merupakan hubungan konseling pada budaya yang berbeda antara konselor dengan konseli. Burn (1992) menjelaskan *cross cultural counseling is the process of counseling individuals who are of different culture/cultures than that of the therapist*. Oleh sebab itu menurutnya sensitivitas konselor terhadap budaya konseli menjadi sangat penting. Ia menegaskan:

It is important for counselors to be sensitive to and considerate of a client's cultural makeup. Clinicians encounter many challenging and complex issues when attempting to provide accessible, effective, respectful and culturally affirming chemical dependency treatment to a multi-cultural population of Deaf and hard of hearing individuals.

Dalam pandangan Rendon (1992) perbedaan budaya bisa terjadi pada ras atau etnik yang sama ataupun berbeda. Oleh sebab itu definisi konseling lintas budaya yang dapat dijadikan rujukan adalah sebagai berikut. *Konseling lintas budaya adalah pelbagai hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompok-kelompok minoritas; atau hubungan konseling yang melibatkan konselor dan konseli yang secara rasial dan etnik sama, tetapi memiliki perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-variabel lain seperti seks, orientasi seksual, faktor sosio-ekonomik, dan usia* (Atkinson, Morten, dan Sue, 1989:37).

Dedi Supriadi (2001:6) mengajukan alternatif untuk keefektifan konseling, setelah mengemukakan definisi konseling lintas budaya. Bagi Dedi, konseling lintas budaya melibatkan konselor dan konseli yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda, dan karena itu proses konseling sangat rawan oleh terjadinya bias-bias budaya pada pihak konselor yang mengakibatkan konseling tidak berjalan efektif. Agar berjalan efektif, maka konselor dituntut untuk memiliki kepekaan budaya dan melepaskan diri dari bias-bias budaya, mengerti dan dapat mengapresiasi diversitas budaya, dan memiliki keterampilan-

keterampilan yang responsif secara kultural. Dengan demikian, maka konseling dipandang sebagai “perjumpaan budaya” (*cultural encounter*) antara konselor dan klien.

c. Pendekatan Konseling Lintas Budaya

Sedikitnya ada tiga pendekatan dalam konseling lintas budaya. *Pertama*, pendekatan universal atau etik yang menekankan inklusivitas, komonalitas atau keuniversalan kelompok-kelompok. *Kedua*, *pendekatan emik (kekhususan-budaya)* yang menyoroti karakteristik-karakteristik khas dari populasi-populasi spesifik dan kebutuhan-kebutuhan konseling khusus mereka. *Ketiga*, pendekatan inklusif atau *transcultural*, yang terkenal sejak diterbitkan sebuah karya Ardenne dan Mahtani’s (1989) berjudul *Transcultural Counseling in Action*. Mereka menggunakan istilah *trans* sebagai lawan dari *inter atau cross cultural counseling* untuk menekankan bahwa keterlibatan dalam konseling merupakan proses yang aktif dan resiprokal (Palmer and Laugngani, 2008 : 156). Namun, Fukuyama (1990) yang berpandangan universal pun menegaskan, bahwa pendekatan inklusif disebut pula konseling “*transcultural*” yang menggunakan pendekatan emik; dikarenakan titik anjak batang tubuhnya menjelaskan karakteristik-karakteristik, nilai-nilai, dan teknik-teknik untuk bekerja dengan populasi spesifik yang memiliki perbedaan budaya dominan.

Pendekatan konseling *trancultural* mencakup komponen berikut.

1. Sensitivitas konselor terhadap variasi-variasi dan bias budaya dari pendekatan konseling yang digunakannya.
2. Pemahaman konselor tentang pengetahuan budaya konselinya.
3. Kemampuan dan komitmen konselor untuk mengembangkan pendekatan konseling yang merefleksikan kebutuhan budaya konseli.
4. Kemampuan konselor untuk menghadapi peningkatan kompleksitas lintas budaya.

Asumsi-asumsi yang mendasari pendekatan konseling *transcultural* sebagai berikut:

1. Semua kelompok-kelompok budaya memiliki kesamaan kebenaran untuk kepentingan konseling;
2. Kebanyakan budaya merupakan musuh bagi seseorang dari budaya lain;
3. Kelas dan jender berinteraksi dengan budaya dan berpengaruh terhadap *outcome* konseling.

2. Model Konseling Lintas Budaya

Palmer and Laungani (2008 : 97-109) mengajukan tiga model konseling lintas budaya, yakni (1) *culture centred model*, (2) *integrative model*, dan (3) *ethnomedical model*.

a. Model Berpusat pada Budaya (*Culture Centred Model*)

Palmer and Laungani (2008) berpendapat bahwa budaya-budaya barat menekankan individualisme, kognitifisme, bebas, dan materialisme, sedangkan budaya timur menekankan komunalisme, emosionalisme, determinisme, dan spiritualisme. Konsep-konsep ini bersifat kontinum tidak dikhotomus.

Pengajuan model berpusat pada budaya didasarkan pada suatu kerangka pikir (*framework*) korespondensi budaya konselor dan konseli. Diyakini, sering kali terjadi ketidaksejalan antara asumsi konselor dengan kelompok-kelompok konseli tentang budaya, bahkan dalam budayanya sendiri. Konseli tidak mengerti keyakinan-keyakinan budaya yang fundamental konselornya demikian pula konselor tidak memahami keyakinan-keyakinan budaya konselinya. Atau bahkan keduanya tidak memahami dan tidak mau berbagi keyakinan-keyakinan budaya mereka.

Oleh sebab itu pada model ini budaya menjadi pusat perhatian. Artinya, fokus utama model ini adalah pemahaman yang tepat atas nilai-nilai budaya yang telah menjadi keyakinan dan menjadi pola perilaku individu. Dalam konseling ini penemuan dan pemahaman konselor dan konseli terhadap akar budaya menjadi sangat penting. Dengan cara ini mereka dapat mengevaluasi diri masing-masing sehingga terjadi pemahaman terhadap identitas dan keunikan cara pandang masing-masing.

b. Model Integratif (*Integrative Model*)

Berdasarkan uji coba model terhadap orang kulit hitam Amerika, Jones (Palmer and Laungani, 2008) merumuskan empat kelas variabel sebagai suatu panduan konseptual dalam konseling model integratif, yakni sebagai berikut :

- 1) Reaksi terhadap tekanan-tekanan rasial (*reactions to racial oppression*).
- 2) Pengaruh budaya mayoritas (*influence of the majority culture*).

- 3) Pengaruh budaya tradisional (*influence of traditional culture*).
- 4) Pengalaman dan anugrah individu dan keluarga (*individual and family experiences and endowments*).

Menurut Jones (Palmer and Laungani, 2008), pada kenyataannya sungguh sulit untuk memisahkan pengaruh semua kelas variabel tersebut. Menurutnya, yang menjadi kunci keberhasilan konseling adalah asesmen yang tepat terhadap pengalaman-pengalaman budaya tradisional sebagai suatu sumber perkembangan pribadi. Budaya tradisional yang dimaksud adalah segala pengalaman yang memfasilitasi individu berkembang baik secara disadari ataupun tidak. Yang tidak disadari termasuk apa yang diungkapkan Jung (1972) dengan istilah *collective unconscious* (ketidaksadaran kolektif), yakni nilai-nilai budaya yang diturunkan dari generasi ke generasi. Oleh sebab itu kekuatan model konseling ini terletak pada kemampuan mengases nilai-nilai budaya tradisional yang dimiliki individu dari berbagai variabel di atas.

c. Model Etnomedikal (*Ethnomedical Model*)

Model etnomedikal pertama kali diajukan oleh Ahmed dan Fraser (1979) yang dalam perkembangannya dilanjutkan oleh Alladin (1993). Model ini merupakan alat konseling transkultural yang berorientasi pada paradigma memfasilitasi dialog terapeutik dan peningkatan sensitivitas transkultural. Pada model ini menempatkan individu dalam konsepsi sakit dalam budaya dengan sembilan model dimensional sebagai kerangka pikirnya.

1) Konsepsi sakit (*sickness conception*)

Seseorang dikatakan sakit apa bila :

- a) Melakukan penyimpangan norma-norma budaya
- b) Melanggar batas-batas keyakinan agama dan berdosa
- c) Melakukan pelanggaran hukum
- d) Mengalami masalah interpersonal

2) Causal/healing beliefs

- a) Menjelaskan model healing yang dilakukan dalam konseling
- b) Mengembangkan pendekatan yang cocok dengan keyakinan konseli
- c) Menjadikan keyakinan konseli sebagai hal familiar bagi konselor
- d) Menunjukkan bahwa semua orang dari berbagai budaya perlu berbagi (share) tentang keyakinan yang sama

3) Kriteria sehat (*wellbeing criteria*)

Pribadi yang sehat adalah seseorang yang harmonis antara dirinya sendiri dengan alamnya. Artinya, fungsi-fungsi pribadinya adaptif dan secara penuh dapat melakukan aturan-aturan sosial dalam komunitasnya.

- a) Mampu menentukan sehat dan sakit
- b) Memahami permasalahan sesuai dengan konteks
- c) Mampu memecahkan ketidakberfungsian interpersonal
- d) Menyadari dan memahami budayanya sendiri

4) **Body function beliefs**

- Perspektif budaya berkembang dalam kerangka pikir lebih bermakna
- Sosial dan okupasi konseli semakin membaik dalam kehidupan sehari-hari
- Muncul intrapsikis yang efektif pada diri konseli

5) **Health practice efficacy beliefs**

Ini merupakan implementasi pemecahan masalah dengan pengarahan atas keyakinan-keyakinan yang sehat dari konseli.

d. **Identitas dan Komponen-Komponen Perbedaan Budaya**

a. **Pengertian Budaya**

Istilah budaya merupakan sesuatu yang kompleks. Apa lagi jika ditelusuri dari asal usul kata di Indonesia, yang berasal dari *budi* dan *daya*. *Budi* berarti pikiran, cara berpikir, atau pengertian; sedangkan *daya* merujuk pada kekuatan, upaya-upaya, dan hasil-hasil. Jika saja budaya diterjemahkan sebagai produk berpikir dan berkarya, maka jelaslah bahwa budaya memang merupakan sesuatu yang amat luas. Bahkan apapun yang nampak di dunia ini, asalkan bukan ciptaan Tuhan pastilah disebut budaya. Oleh sebab itu Berry, *at all*, (1992) menegaskan culture as *“that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, laws, custom and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society”*. Bahkan lebih tegas lagi Padden (1980) menjelaskan, bahwa budaya berarti, *“the total social heredity of mankind”*. Ahli lainnya pun menegaskan demikian (Leong and Kim, 1991 : 112) bahwa *culture refers to the widely shared ideals, values, formation and uses of categories, assumptions about life, and goal-directed activities that become unconsciously or subconsciously accepted as 'right' and 'correct' by people who identify themselves as members of a society*”.

Definisi-definisi tersebut merupakan rujukan sebagai konsepsi budaya dalam konseling lintas budaya.

b. Komponen-komponen Perbedaan Budaya

Model konseptual perbedaan budaya dalam pembahasan ini mengacu kepada Palmer dan Laungani (2008 : 45). Konstruksi teoretis perbedaan budaya yang diajukannya sebagai berikut.

- 1) Individualism Communalism (Collectivism)
- 2) Cognitivism Emotionalism
- 3) Free Will Determinism
- 4) Materialism Spiritualism

Dalam pengembangan konsep utuh bimbingan di Indonesia, perlu diperhatikan komponen-komponen perbedaan budaya. Apalagi Indonesia dikenal dengan keragaman yang kompleks baik segi demografis, sosial-ekonomis, adat-istiadat, maupun latar budayanya. Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa Indonesia dalam perspektif konseling lintas budaya, layak dikembangkan dimensi wawasan ke-bhinnekaan-nya dalam kerangka penegasan karakteristik ke-tunggal-an yang kuat.

Adapun komponen-komponen yang perlu diperhatikan dalam pengembangan konsep utuh bimbingan dan konseling di Indonesia mesti terfokus pada orientasi nilai budaya yang menghendaki kehidupan masyarakat yang selaras dengan alam. Koentjaraningrat (1993) menyebut orientasi nilai budaya sebagai mentalitas. Menurut dia, di antara sedemikian banyak komponen mentalitas yang dimiliki berbagai kebudayaan suku bangsa di Indonesia, dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan, terdapat empat komponen yang menonjol, yaitu : (1) konsepsi waktu yang sifatnya sirkuler (waktu itu “beredar” tidak “berlangsung”); (2) hidup terlalu bergantung pada nasib; (3) sikap kekeluargaan dan gotong-royong yang sangat kuat; dan (4) orientasi nilai budaya vertikal.

Persepsi waktu yang sirkuler adalah gagasan dan keyakinan, bahwa masa yang telah lampau selalu akan kembali. Persepsi waktu yang beredar tidak linier dilatari oleh kehidupan agraris, yang menunjukkan lingkaran proses pertanian akan terulang tiap tahun. Hal inipun masih melatarbelakangi cara berpikir orang Indonesia pada umumnya, meskipun kaum pelajar di Indonesia telah banyak berpikir berdasarkan konsep waktu yang linier. Kalau tidak demikian, maka tidak

mungkin bangsa Indonesia merencanakan berbagai kebijakan pembangunan dengan teliti.

Konsep waktu yang sirkuler dalam cara berpikir umumnya orang Indonesia, seyogianya dipahami oleh konselor sebagai bahan masukan guna mengantisipasi atau memprediksi persepsi dan sikap klien terhadap persoalan yang tengah dihadapinya. Persepsi yang demikian tentang waktu kemungkinan berdampak terhadap anggapan dan sikap, bahwa persoalan yang dihadapi adalah biasa sehingga tidak diperlukan pengatasan atau bantuan orang lain untuk mengatasinya; mengingat orang lain pun berhadapan dengan persoalan yang sama dan selalu berulang. Kalaupun persoalan itu dibicarakan, terbatas pada lingkup orang-orang yang berlatar atau berkaitan secara kekeluargaan dan hanya menegaskan bahwa mereka pun mengalami hal yang sama. Pendek kata, persoalan kehidupan dipandang sebagai sesuatu yang “biasa”, dibiarkan saja, karena akan hilang dan muncul secara alami. Dampaknya, diperkirakan “kita” tidak tertantang untuk kreatif dan inovatif dalam memproduksi piranti keras ataupun lunak.

Orientasi nilai budaya yang juga berakar pada kebudayaan agraris ditambah dengan keadaan yang diakibatkan oleh kemiskinan, adalah sikap hidup yang terlalu menggantungkan diri pada nasib. Menurut Koentjaraningrat (1993:4), apabila kita menginginkan peningkatan kemakmuran melalui jalur industrialisasi, maka orientasi nilai budaya atau mentalitas seperti itulah, yang sangat perlu diubah atau digeser menjadi mentalitas yang lebih aktif.

Orang yang terlalu bergantung pada nasib artinya menyerahkan diri pada nasibnya sendiri, kehilangan semangat untuk berikhtiar, menjalani kehidupan tanpa repot-repot membuat rencana, kendati banyak alternatif tidak memandang perlu mengambil pilihan, menunda keputusan sampai nasib menghampirinya, kehilangan harapan yang optimis; bahkan mungkin melupakan firman Allah atas pentingnya ikhtiar untuk mengubah nasib.

Dalam adegan pengembangan bimbingan dan konseling di Indonesia, tampaknya para konselor mesti memperkaya wawasannya tentang konsep takdir *mubrom* dan *muallaq*, hingga dirinya menjadi pribadi yang aktif dan proaktif serta mengembangkan layanan konseling berdasarkan landasan nilai optimistik dan pandangan kehidupan yang mencerahkan secara hakiki. Dengan kata lain dapat dikiaskan, bahwa pengembangan bimbingan dan konseling akan

berkonstruksi rapuh, manakala dibangun di atas landasan menyerah kepada nasib menunggu bintang jatuh.

Komponen ketiga yang perlu diperhatikan adalah orientasi nilai budaya yang berupa sikap kekeluargaan dan gotong royong yang sangat kuat dalam masyarakat Indonesia. Kendati mentalitas ini menyiratkan kesamaan pada umumnya, tetapi titik anjak dan bentuk pengoperasionalannya berbeda-beda pada sebagian besar anggota masyarakat. Koentjaraningrat (1993) mengemukakan, dalam diskusi-diskusi pernah diajukan kemungkinan, bahwa untuk industrialisasi diperlukan mentalitas yang lebih mandiri, lebih bertanggungjawab sendiri, tidak terlampaui menggantungkan diri pada keluarga ataupun bantuan gotong-royong dari lingkungan. Selanjutnya dia menyatakan, banyak di antara kita memang masih perlu membiasakan diri untuk bersikap lebih mandiri dalam banyak hal, serta lebih berani bertanggungjawab atas kekurangan dan kesalahan kita, tanpa mengurangi asas kekeluargaan dan penggeseran mentalitas yang terlalu menggantungkan diri pada gotong-royong. Namun tidak perlu khawatir, bahwa nilai-nilai kekeluargaan dan gotong-royong menghambat kemajuan; sebab walaupun asas kekeluargaan dalam masyarakat Jepang tetap kuat, bangsa Jepang telah berhasil menjadi salah satu negara yang terkaya di dunia, dan memiliki sistem industri yang sangat maju.

Implikasi dari komponen ketiga bagi pengembangan konsep utuh bimbingan di Indonesia adalah pengembangan piranti-piranti strategis untuk kepentingan konseling kelompok dan konseling keluarga dalam perspektif lintas budaya. Dasar pertimbangannya adalah, bahwa orientasi nilai budaya kekeluargaan dan gotong-royong merupakan modal landasan konseptual yang dapat dijadikan mediator guna memfasilitasi keberlangsungan konseling lintas budaya dalam adegan kelompok ataupun keluarga. Rupanya, studi-studi ke arah penggalian dan pengembangan konsep ini perlu ditingkatkan guna mengokohkan bangun konseling lintas budaya di Indonesia.

Komponen yang keempat, yaitu orientasi vertikal, terasa kuat tidak hanya dalam masyarakat Jawa dan Bali, tetapi ternyata juga dalam sebagian besar berbagai suku bangsa penduduk Sumatera dan Indonesia Timur. Kenyataan ini merupakan hasil penelitian orang Indonesia sendiri di beberapa tempat di Nusantara (Koentjaraningrat, 1993). Secara nyata orientasi vertikal itu adalah ketaatan pada orang tua, orang senior, guru, pemimpin, orang berpangkat tinggi,

komandan, dan sebagainya, sehingga seseorang dengan orientasi vertikal tidak akan bertindak tanpa suatu instruksi atau restu dari atas.

Khusus dalam kebudayaan Jawa, ketaatan merupakan sifat yang dinilai sangat tinggi. Anak yang *manut* (yaitu taat) adalah anak yang sangat terpuji, sementara anak yang selalu mempunyai kehendak sendiri dan gemar mengeksplorasi segala hal di sekitarnya, dianggap mengganggu dan tidak dianggap sebagai anak yang sopan dan santun.

Disinyalir pula oleh Koentjaraningrat, bahwa sangat disayangkan kebanyakan orang di Indonesia masih kurang taat pada hal-hal yang kurang konkret, seperti misalnya hukum dan peraturan-peraturan, apalagi pada hal yang lebih abstrak, yaitu prinsip. Namun, untunglah orang Indonesia pada umumnya taat menjalani ibadah keagamaan, sehingga pelaksanaan sila pertama dalam ideologi negara kita dapat memperkuat ketenteraman jiwa manusia, yang hidup dalam masa pancaroba yang sedang dan masih akan dialami dalam 25 tahun mendatang.

Tampaknya ketaatan seperti itu perlu dipersoalkan, terutama dalam kerangka penumbuh-kembangan prinsip disiplin yang tidak bergantung pada ada atau tidak adanya pengawasan. Konsep Islam tentang *khusyu'* dalam shalat dan *imsyak* dalam *shaum* perlu dikaji secara komprehensif untuk selanjutnya diterjemahkan ke dalam landasan kehidupan sehari-hari, termasuk dalam kehidupan konseling.

Dalam konteks pengembangan konsep utuh bimbingan dan konseling di Indonesia, rupanya diperlukan pengkajian lintas-disiplin yang terfokus pada perspektif metafisis tentang orientasi nilai vertikal dan latar belakang sikap "orang atasan" terhadap perilaku dan nilai ketaatan. Hasil pengkajian dipandang sumbangan konseptual yang besar dan amat berharga, terutama bagi pengembangan bimbingan dan konseling yang berpijak pada nilai-nilai budaya lokal tetapi berlaku universal.

e. Masukan Unsur Lintas Budaya dalam Rancangan dan Implementasi Program Bimbingan dan Konseling

Untuk memasukkan unsur lintas budaya dalam merancang dan mengimplementasikan program bimbingan dan konseling di sekolah, terlebih dahulu dilakukan pengkajian dalam rangka menjawab tantangan utama bagi seorang konselor sekolah. Pengkajian dapat dilakukan, baik dalam bentuk studi

literatur, pengamatan intensif, maupun secara partisipasi dalam pergaulan dengan khalayak klientsal. Pengkajian yang dimaksud terutama difokuskan atau untuk menjawab tantangan, bahwa konselor sekolah yang bekerja dengan individu yang berbeda latar belakang budayanya, hendaknya mampu dan sanggup mendemonstrasikan pemahaman dan apresiasinya terhadap perbedaan budaya.

Kemampuan dan kesanggupan tersebut pada gilirannya diformulasikan ke dalam: (1) sebagian pernyataan tujuan yang akan dicapai melalui program bimbingan dan konseling yang dirancang; dan (2) keterampilan-keterampilan yang bersifat responsif untuk kepentingan layanan konseling terhadap klien.

Langkah berikutnya adalah merefleksi kondisi lingkungan budaya persekolahan, baik yang menyangkut keragaman asal-usul personel sekolah dan pola interaksi di antara mereka, pelbagai variabel latar belakang yang memungkinkan bias budaya, maupun budaya organisasi dan kepemimpinan yang berkembang di sekolah. Refleksi ini penting, terutama untuk merancang perangkat-perangkat pengidentifikasi dan garis-garis besar strategi intervensi melalui layanan bimbingan dan konseling.

Hasil pemaduan kedua langkah tersebut dilanjutkan pada penyusunan program bimbingan dan konseling yang responsif secara budaya, yang oleh Yagi (1998) disebut 3 C's (3K) yaitu melingkupi: *counselling* (konseling), *consultation* (konsultasi), dan *coordination* (koordinasi).

Konseling, merupakan hubungan interpersonal antara konselor dengan klien yang bersifat membantu. Dalam konseling, klien dibantu oleh konselor dalam bentuk kemudahan (fasilitas) baik secara kuratif, preventif, maupun promotif-developmental. *Konsultasi*, merupakan bentuk hubungan vertikal antara konselor dengan manajemen puncak (*top management*) dalam hirarki organisasi kerja profesional; sedangkan *koordinasi*, pada dasarnya merupakan hubungan horizontal antara konselor dengan sejawat atau kolega dalam rangka menangani kasus.

Dalam pengimplementasiannya, konselor sekolah yang responsif secara budaya harus berupaya menggunakan kesadaran, pengetahuan dan keterampilan-keterampilan multibudaya di dalam konteks pertemuan yang terfokus pada perkembangan akademik, karier, pribadi dan atau sosial, serta kebutuhan para siswa dari lingkungan yang secara budaya berbeda.

f. Strategi Bimbingan dan Konseling Berwawasan Kebangsaan Sebagai Salah Satu Alternatif Bagi Implementasi Bimbingan dan Konseling Lintas Budaya

Diskursus tentang pranata pendidikan yang berfungsi sebagai pengembang sumberdaya manusia (*human resources*) yang bermutu sudah merupakan keniscayaan dalam kehidupan masyarakat yang majemuk (Bhinneka) seperti Indonesia. Keniscayaan seperti itu berdampak tidak hanya terhadap pengayaan wawasan konseptual, melainkan berimplikasi bagi wilayah praksis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak bukti empirik yang menunjukkan bahwa suatu negara yang lebih memprioritaskan pembangunan pendidikan daripada pranata lainnya, ternyata sanggup menghasilkan sumberdaya manusia yang lebih unggul, produktif dan inovatif dalam percaturan kehidupan global. Sebaliknya, suatu negara atau bangsa yang mengecilkkan pembangunan pranata pendidikan lebih cepat mengalami keterpurukan, disebabkan sumberdaya manusianya tidak berdayasaing tinggi dalam percaturan kehidupan.

Pendidikan sebagai hajat hidup bangsa di negara manapun selalu diorientasikan kepada pengembangan individu (manusia) agar mencapai pribadi yang lebih bermutu. Perbedaan yang esensial antara satu negara dengan negara lainnya terletak pada formulasi konsep pribadi yang bermutu itu serta praksis pendidikan sebagai upaya pencapaiannya.

Dalam menempuh pembangunan pranata pendidikan yang berfungsi seperti itu diperlukan kebijakan yang bervisi prospektif, yang ditunjang oleh gagasan konseptual yang komprehensif dan manajemen praksis pendidikan yang terintegrasi. Dengan kata lain, pada tingkat pemerintahan harus ada kemauan politik yang memihak pendidikan, yang ditunjang oleh para pakar dan cendekiawan yang kompeten dalam melahirkan gagasan kreatif dan inovatif, serta kalangan praktisi di lapangan yang profesional.

a. Makna Manusia Bermutu

Hakikat individu yang lebih bermutu dalam diskursus pendidikan di Indonesia mengacu pada individu sebagai pribadi yang utuh. Pribadi yang utuh sebagai hasil pendidikan, tertuang secara ideal dalam fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang berbunyi: *mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan*

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UURI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas).

Tujuan tersebut memberikan acuan, bahwa seluruh jenjang dan jalur pendidikan di Indonesia seyogyanya berupaya untuk mencapai manusia yang cerdas dengan ciri-ciri sebagaimana disebutkan. Tujuan yang ideal itu hendaknya ditransformasikan secara lebih operasional, baik pada tataran institusi pendidikan, kurikulum atau program, maupun pada tataran instruksional hingga lebih memungkinkan untuk dicapai.

Persoalan selanjutnya terletak pada rumusan tujuan pendidikan pada tataran empirik dan praksis pendidikan, serta keterkaitan pencapaian hasil pendidikan dengan pemenuhan kebutuhan manusia pengisi masa depan negara Indonesia. Secara operasional persoalannya dapat diungkapkan ke dalam pertanyaan sebagai berikut: (1) Adakah rumusan kriteria standar pencapaian tujuan untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan?; (2) Apakah rumusan tujuan tersebut sesuai dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat Indonesia di masa depan?; (3) Konsep strategi makro pendidikan seperti apa yang seyogianya dijadikan acuan?; dan (4) Implikasi strategis bimbingan dan konseling seperti apa yang dapat menunjang penyelenggaraan pendidikan yang berorientasi pengembangan individu seperti itu?

Pertanyaan pertama lebih mengacu kepada perlunya dilakukan penelitian yang komprehensif tentang karakteristik manusia cerdas, yang menghasilkan standar-standar minimal pencapaian tujuan pendidikan untuk setiap jenjang dan jenis pendidikan. *Pertanyaan kedua* merujuk pada pemikiran rasional yang menjelaskan dan memprediksi tentang perkembangan masyarakat Indonesia masa depan di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bangsa lain di dunia ini. Dengan kata lain, pertanyaan kedua mengarah kepada jawaban tentang skenario masyarakat Indonesia masa depan, yang mencakup individu-individu yang bermutu sebagaimana diharapkan oleh tujuan pendidikan. *Pertanyaan ketiga* merupakan arahan implikatif bagi praksis pendidikan yang berorientasi pengembangan pribadi berdasarkan skenario masyarakat yang diprediksikan. Kemudian *pertanyaan keempat* lebih menegaskan strategi mikro pendidikan melalui upaya bimbingan dan konseling.

b. Skenario Masyarakat Masa Depan

Skenario masyarakat masa depan merupakan gambaran masyarakat hari ini dan sesudahnya, yang inklusif dengan individu-individu sebagai pribadi yang bermutu sebagaimana menjadi orientasi pendidikan. Asumsi yang melandasinya adalah, bahwa praksis pendidikan yang diselenggarakan hari ini pada hakikatnya diarahkan kepada pengisi kehidupan masa depan. Tidak ada praksis pendidikan yang ditujukan untuk mengembangkan pengisi masa lampau yang telah lewat. Dengan kata lain, tujuan pendidikan yang diformulasikan ke dalam pernyataan yang akan dicapai berkaitan erat dengan masyarakat masa depan yang diproyeksikan.

Apa masa depan itu? Masa depan itu adalah sekarang, saat ini, detik ini, dan dia mencakup seluruh masa sesudahnya (Ziauddin Sardar, 1979). Dikarenakan dipandang dari saat ini, maka masa depan terbentuk dari beberapa *alternatif masa depan* yang dituju oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya alternatif masa depan itu dapat dianggap sebagai horizon rencana yang dapat dipilih dan akan mendatangkan hasil.

Sardar (1979) membagi horizon rencana itu ke dalam lima periode dasar, yaitu sebagai berikut: (1) *Masa depan terdekat*, dimulai sejak saat ini sampai tahun depan. Sebagai suatu horizon rencana, masa depan ini mengetengahkan pilihan yang agak terbatas, sebab masih bergantung kepada masa lampau. Keputusan atau tindakan yang diambil saat ini hanya memberi pengaruh kecil, bahkan mungkin tidak berpengaruh sama sekali; (2) *Masa depan yang dekat*, dimulai dari tahun ini sampai lima tahun mendatang dan merupakan jangka waktu yang banyak dipilih untuk rencana-rencana perkembangan dari hampir semua negara berkembang. Keputusan dan pilihan kebijaksanaan dapat dibuat dan dapat menyebabkan timbulnya perubahan-perubahan besar dalam jangka waktu ini; tapi tidak benar-benar menyuguhkan perubahan yang sifatnya revolusioner dalam jangka waktu yang sesingkat itu; (3) *Masa depan satu generasi*, yakni masa depan yang berkisar dari lima sampai dua puluh tahun, yang merupakan waktu yang diperlukan untuk menumbuhkan dan mematangkan satu generasi. Dalam kerangka ini, keputusan dan kebijaksanaan yang diambil sekarang dapat mempengaruhi masa depan generasi berikutnya. Dengan wawasan ke muka dan diciptakannya keadaan yang sesuai, hampir semua rencana dapat dijadikan kenyataan dalam jangka waktu ini; (4) *Masa depan multigenerasi/jangka panjang*, yakni jangka waktu yang mencakup beberapa generasi, berkisar dari lima puluh sampai enam puluh tahun. Meskipun pada

umumnya merupakan masa depan yang tak dapat dikendalikan (dari sekarang), tidaklah mustahil untuk melihat/merebut kesempatan/krisis di muka; dan (5) *Masa depan yang jauh berkisar* dari lima puluh tahun dan seterusnya. Dalam jangka waktu ini hanya mungkin untuk membuat spekulasi.

Skenario masyarakat masa depan bukanlah ramalan masa depan masyarakat itu sendiri, melainkan suatu gambaran pelbagai alternatif yang dapat timbul sebagai akibat dari keputusan dan tindakan yang diambil pada masa sekarang, serta memungkinkan untuk dilakukan. Dengan demikian, di dalam skenario masyarakat masa depan terlingkup baik subjek pelaksana, objek sasaran, maupun tujuan dan nilai perencanaan; yang didasarkan atas pengalaman kritis masa lampau dan analisis terhadap fenomena-fenomena faktual masa kini.

Masyarakat masa depan seperti apa yang dapat dijadikan orientasi dan intervensi pendidikan? Dalam pertanyaan lain, karakteristik manusia macam mana yang seyogianya dikembangkan oleh pendidikan sekarang dan sesuai dengan kebutuhan kehidupan di masa depan? Para ahli memprediksikan, bahwa di masa depan itu akan terwujud suatu masyarakat: (1) *modern* yang berbeda dengan masyarakat tradisional; dan (2) *global* yang berhadapan dengan masyarakat dalam adegan lokal/nasional.

1. Karakteristik Masyarakat dan Manusia Modern

Perubahan lingkungan alam yang dialami manusia modern dapat diringkaskan dengan mempergunakan beberapa istilah pokok berikut: *urbanisasi*, *pendidikan*, *politikisasi*, *komunikasi massa*, dan *industrialisasi*. Istilah-istilah tersebut menunjukkan perbedaan antara manusia modern dengan nenek moyangnya yang hidup dalam masyarakat tradisional; yang banyak bekerja di ladang sebagai petani, sementara manusia modern lebih banyak dipekerjakan dalam suatu perusahaan besar dan produktif berdasarkan pemakaian sumber tenaga secara besar-besaran dan teknologi yang telah maju.

Pelbagai kegiatan perekonomian yang timbul karena pemusatan industri di tempat-tempat tertentu dan tuntutan-tuntutan dari pemusatan itu menyebabkan manusia modern cenderung untuk hidup dalam kota-kota atau dalam bentuk pengelompokan sejenis kota. Di sini orang tidak saja akan hidup berjejal-jejal, tetapi juga terbuka bagi segala macam hal dan dorongan-dorongan yang merupakan ciri khas dari kehidupan kota. Salah satu dari rangsangan itu

adalah alat komunikasi massa, baik berbentuk cetak maupun elektronik. Pengalaman orang akan ide-ide baru akan bertambah lagi dengan pengaruh sekolah, bila tidak langsung pada dirinya sendiri, maka anak-anaknyalah yang akan membawa pengaruh itu di rumahnya.

Besar kemungkinan bahwa manusia modern berhubungan dengan politik terutama pada tingkat nasional, karena ia lebih terbuka bagi komunikasi massa, lebih bergerak dalam arus kehidupan kota, dan lebih banyak dibujuk oleh paham-paham politik yang bersaing untuk mendapat dukungannya. Ciri lain dari manusia kontemporer ialah, mereka tidak lagi hidup di tengah-tengah suatu jaringan keluarga terdekat atau ikatan penduduk desa, melainkan lebih tertarik ke dalam suatu lingkungan yang lebih impersonal dan birokratis; atau berhubungan dengan orang secara formal dan kurang akrab (Inkeles, 1983).

Ciri-ciri lingkungan hidup yang dapat dialami oleh manusia modern di atas bagi Inkeles bukanlah merupakan kemodernan; sebab kota-kota yang terpadat pun mungkin mempunyai jaringan manusiawi yang paling tradisional; alat-alat komunikasi massa dapat saja menyebarkan ide-ide kearifan dari desa; pabrik-pabrik dapat saja berjalan berdasarkan prinsip-prinsip yang tidak jauh dari persawahan dan perladangan; dan politik dapat saja dijalankan seolah-olah suatu dewan desa yang diperluas.

Inkeles melukiskan manusia modern itu berdasarkan serangkaian sikap dan nilai yang diuji pada suatu penelitian, yang mencakup sembilan karakteristik sebagai berikut: (1) Sedia untuk menerima pengalaman-pengalaman yang baru dan terbuka bagi pembaharuan dan perubahan; (2) Berkesanggupan untuk membentuk atau mempunyai pendapat mengenai sejumlah persoalan, baik yang timbul di sekitarnya maupun di luar. Tanggapan terhadap dunia opini tersebut lebih bersifat demokratis; (3) Pandangan tentang persoalan waktu ditujukan pada masa kini dan masa depan, bukan ke masa lampau; menghargai ketepatan waktu dan keteraturan; (4) Beranggapan wajar apabila dalam hidupnya berkeinginan dan terlibat dalam perencanaan dan organisasi; (5) Berkemampuan untuk meyakini kemampuan manusia dapat belajar; dalam batas-batas tertentu menguasai alam, bukan dikuasai seluruhnya oleh alam; (6) Berkeyakinan bahwa keadaan dapat diperhitungkan, bukan menyerahkan diri sepenuhnya kepada nasib atau keadaan; (7) Menyadari akan harga diri orang-orang lain dan bersedia untuk menghargainya; (8) Mempercayai ilmu dan teknologi sekalipun dalam bentuk yang paling primitif; dan (9) Mempercayai keadilan yang distributif.

Dengan memperhatikan karakteristik manusia modern tersebut tampaknya konsepsi sumberdaya manusia yang bermutu ke depan perlu mengalami perubahan. Koentjaraningrat (1993) menyatakan bahwa perubahan itu diperlukan dari orientasi nilai budaya (mentalitas) agraris ke mentalitas berkebudayaan industri. Kebijakan-kebijakan untuk mencapainya lebih banyak bersifat kebijakan sosial-budaya (terlingkup pendidikan) daripada kebijakan ekonomi dalam arti khusus.

Pengembangan mentalitas yang dimaksud bukan berarti penghilangan, tetapi memperhalus dan lebih memfokuskan pada upaya peningkatan atas karakteristik manusia berkualitas yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan masa depan yang modern.

2. Masyarakat Global

Masyarakat abad ini adalah masyarakat global, yang ditandai dengan kesaling-bergantungan, keberkaitan dan penciptaan jaringan-jaringan kerja (*networking*). Tanda-tanda tersebut terjadi dalam pelbagai aspek kehidupan, politik, sosial-budaya, ekonomi, dan teknologi. Satu hal yang amat menakjubkan dalam masyarakat global adalah jaringan informasi yang sangat luas, cepat, mudah diakses oleh siapapun, kapanpun dan di manapun. Pergeseran informasi dari untuk didengar kepada informasi untuk dilihat, menyebabkan jutaan *byte* informasi datang setiap detik, sehingga manusia dapat mengalami *oversupply* informasi yang penuh dengan ketidakpastian dan bahkan kesemrawutan.

Kehidupan global telah meningkatkan ekspektasi manusia akan status dan kualitas kehidupan yang lebih baik, menempatkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan berkomunikasi sebagai piranti utama untuk mewujudkan ekspektasi itu. Informasi menjadi hal yang amat penting bagi manusia dalam menguasai pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Kultur kehidupan telah semakin cenderung bergeser ke arah lebih banyak mencurahkan waktu untuk kepentingan kerja dan upaya mencapai hasil kerja sebaik-baiknya (*excellencies*). Orientasi kerja adalah orientasi layanan yang tidak terlalu terikat lagi oleh hari kerja, tetapi lebih bergantung kepada kebutuhan layanan itu untuk diberikan. Kecenderungan ini merupakan dampak positif dari proses globalisasi yang mendorong manusia untuk terus berpikir dan meningkatkan kualitas kemampuan, dan tidak puas terhadap apa yang telah dicapainya pada saat ini (Sunaryo Kartadinata, 2000).

Masa depan yang global yang tengah dihadapi mengandung situasi-situasi baru, yang sebelumnya tidak terduga dan tidak akan dapat dihadapi dengan pola-pola perilaku yang telah dikuasai selama ini. Artinya, sebagian dari situasi-situasi yang selama ini dan sampai sekarang ini seolah-olah merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, akan hilang digantikan oleh situasi-situasi baru yang sampai saat ini belum pernah muncul dalam sejarah kehidupan umat manusia.

Kondisi atau situasi global menuntut manusia untuk mampu memilih, menimbang, mengarifi, merekonstruksi, dan memaknai informasi untuk kepentingan pemilihan alternatif dan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, kompleksitas, ketidakpastian, paradoks yang dapat menimbulkan kebingungan, kecemasan dan frustrasi manusia pada hakikatnya adalah wahana belajar sepanjang hayat bagi manusia untuk menampilkan eksistensi dirinya di dalam dunia global ini.

c. Perspektif Strategi Pendidikan Berwawasan Kebangsaan

Kondisi masa depan yang tergambar dalam skenario di atas mencakup kilasan karakteristik bagian luar (lingkungan alam) dan karakteristik bagian dalam atau manusia sebagai subjek dan objek orientasi dan intervensi pendidikan. Gambaran kedua aspek tersebut berimplikasi bagi terciptanya strategi makro pendidikan yang berorientasi pengembangan individu sebagai pribadi yang utuh atau manusia yang berkembang sumberdayanya secara bermutu, sebagaimana yang dimaksudkan dalam tujuan pendidikan.

Apabila pendidikan dipandang sebagai pranata vital dalam mengembangkan sumberdaya manusia yang bermutu, maka pemungsiannya tidak hanya diorientasikan kepada *pemahaman* wawasan kebangsaan, melainkan harus melingkupi matra-matra yang lain secara terpadu, hingga diperoleh keutuhan internalisasi pada pribadi individu sebagai peserta didik.

Dalam masyarakat Indonesia yang bhinneka sekurang-kurangnya perlu dikembangkan tiga matra wawasan kebangsaan, yang meliputi matra *paham kebangsaan, rasa kebangsaan* dan *semangat kebangsaan*.

Matra Paham Kebangsaan, merupakan refleksi dari kesadaran individu (peserta didik) akan kebhinneka-tunggalikaan masyarakat Indonesia. Refleksi kesadaran tersebut dijadikan pedoman berperilaku dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat yang majemuk. Refleksi kesadaran ini dilandasi oleh pemahaman yang dalam akan kondisi geografis, latar belakang sejarah,

pandangan hidup, kesenian, dan bahasa Indonesia. Keseluruhan landasan tersebut hendaknya menjadi fasilitas bagi peserta didik dalam bergaul dan atau berinteraksi dengan sesamanya.

Matra Rasa Kebangsaan, dimaksudkan sebagai dimensi kesadaran yang bersifat apresiatif (menerima dan menghargai) atas perbedaan-perbedaan keadaan diri, asal-usul keturunan dan suku bangsa, tetapi tetap mengekspresikan perasaan yang sama sebagai bangsa Indonesia.

Matra Semangat Kebangsaan, dimaksudkan sebagai dinamika perilaku yang atraktif yang diwujudkan dalam perbuatan senasib-sepenanggungan, toleransi, tenggang rasa, saling menghormati dan sanggup berkompetisi secara sehat serta menunjukkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah bangsa lain di dunia ini.

Ketiga matra tersebut hendaknya dijadikan objek orientasi praksis pendidikan, yang tidak hanya berorientasi pada masa lalu dan kini, melainkan ke masa depan kehidupan masyarakat majemuk. Dalam hal ini diyakini, bahwa kehidupan itu sendiri mengarah kepada masa depan, bukan surut ke belakang waktu. Dengan kata lain, lembaga pendidikan harus berupaya merebut dan menginternalkan masa depan kehidupan masyarakat yang majemuk pada masa kini melalui strategi pendidikan yang tepat.

Hasil studi tentang pelaksanaan program pembauran di bidang pendidikan (1999-2000) di delapan provinsi, merekomendasikan perlunya pembinaan kesatuan bangsa melalui bidang pendidikan. Implementasi pembinaan tersebut hendaknya diwujudkan dalam bentuk penciptaan lembaga-lembaga pendidikan di daerah-daerah yang bercorak budaya Bhinneka Tunggal Ika melalui strategi pendidikan yang menumbuhkembangkan nilai-nilai religius, teoretik, ekonomik, humanistik, politik dan estetik secara terpadu.

Dalam rekomendasi studi dinyatakan, bahwa langkah-langkah operasional tentang pembinaan kesatuan bangsa yang dimaksud hendaknya sejalan dengan otonomi daerah. Adapun yang menjadi dasar pertimbangannya, yaitu: (1) setiap daerah berpotensi untuk mengembangkan kebhinnekaan yang unggul; sehingga apabila teraktualisasikan melalui pendidikan, maka akan memperkuat keikaan bangsa Indonesia; dan (2) strategi pendidikan yang memadukan nilai-nilai tersebut merupakan salah satu langkah kebijakan yang demokratis dalam rangka pemberdayaan daerah melalui bidang pendidikan.

Selanjutnya dalam uji-coba implementasi program pendidikan berwawasan kebangsaan (2002/2003) pada 22 provinsi dan melibatkan 66 SLTP

sampel diperoleh gambaran, bahwa program tersebut berdampak positif dan konstruktif terhadap pembangunan bangsa yang bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika melalui pendidikan dalam wujud aktivitas yang bersifat rekreatif, kreatif, dan inovatif serta sesuai dengan karakteristik khas daerah masing-masing.

Guna mengembangkan manusia yang dapat hidup dan mampu menghadapi masa depan yang dimaksud, pendidikan seyogianya diorientasikan pada pemanfaatan kondisi masa depan dan karakteristik manusia sebagai sumberdaya dan wahana belajar sepanjang hayat. Kendati pernyataan tersebut tampaknya klasik, tetapi kandungannya merujuk pada perluasan makna belajar itu sendiri sebagai suatu kebutuhan manusiawi yang tidak dapat ditawar-tawar.

Peter Jarvis (1992) menggambarkan, bahwa proses belajar manusia berlangsung dalam kondisi paradoks, yakni suatu kondisi yang tumbuh dari kulminasi kontradiksi kehidupan dalam masyarakat. Masalah-masalah yang muncul di dalam paradoks tersebut bukanlah semata-mata masalah ilmu pengetahuan, teknologi, ekonomi, dan sosial, melainkan masalah kemanusiaan. Hal ini mengisyaratkan, bahwa upaya dan intervensi sistematis diperlukan untuk membawa umat manusia ke arah yang lebih cerah dan bermutu agar tidak terjerumus ke jurang kenistaan.

Suatu hal yang menguntungkan bagi manusia, karena menurut Bronowski (Sunaryo Kartadinata, 2000) manusia memiliki *long childhood* atau memiliki masa belajar yang panjang, fleksibilitas, dan plastisitas berpikir, yang membuat dirinya mampu berimajinasi, merekonstruksi, dan memaknai pengalaman masa lalu serta membentuk, mengklarifikasi, dan mengantisipasi kepuasan-kepuasan yang dapat dicapainya pada masa yang akan datang.

Pendidikan yang berorientasi pengembangan individu manusia sebagai pribadi yang bermutu pada dasarnya adalah pendidikan yang berpangkal tolak pada pengembangan diri, dan bertujuan kembali kepada persoalan pribadi yang mengintegrasikan relasi antara nafsani dan jasmani dalam kesatuan wujudnya. Jadi, membina pribadi berarti membangun insan seutuhnya, yang berasaskan keseimbangan antara pembangunan fisik-materiil dengan psikis-religius. Dalam konsep Islam, orientasi ini disebut membina nafsin (Qamarulhadi, 1986). Dengan kata lain, melalui pendidikan manusia dapat menjadi pribadi yang bermutu, apabila ia mau belajar mengetahui apa yang dipelajari atau dikerjakan, untuk apa belajar, dan apa dasarnya ia belajar.

Strategi makro pendidikan yang mengarah kepada belajar sepanjang hayat dan diorientasikan untuk mengembangkan pribadi yang bermutu oleh para ahli disebut *innovative learning* (belajar inovatif) (Lihat Botkin, Elmandjra dan Malitza, 1979). Belajar inovatif merupakan strategi pendidikan yang diprediksi relevan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat modern dan global; yang berbeda dengan strategi *maintenance learning*, yang cenderung berlaku pada masyarakat tradisional dan lokal.

Dalam strategi belajar memelihara (*maintenance learning*), kegiatan belajar dilakukan terutama untuk mempertahankan apa yang sudah ada dalam masyarakat dan kebudayaan yang dimiliki sebagai warisan kultural. Strategi belajar ini terlalu bersifat adaptif atau menyesuaikan diri secara pasif dengan apa yang sudah ada. Sudah barang tentu, strategi belajar demikian akan terasa kurang memadai, bila diperhadapkan dengan semakin deras arus informasi sekarang dan ke depan. Hasil-hasil belajar memelihara tidak pernah berdaya ketika dihadapkan pada situasi baru, situasi yang tidak terduga sebelumnya. Akhirnya akan terjadi suatu krisis yang muncul dalam bentuk ketidakberdayaan atau *shock*. Kondisi semacam ini selanjutnya memaksa manusia mencari suatu modus belajar yang baru, yang benar-benar efektif untuk menghadapi keadaan yang baru tadi.

Kelambanan gerak pada modus belajar tradisional (belajar memelihara) di banyak negara termasuk negara-negara maju, muncul dalam gejala *learning lags* (Mochtar Buchori, 1987) yang besarnya dapat mencapai 30 tahun atau lebih. *Learning lag* ialah kesenjangan yang terdapat antara waktu ketika pertama kali timbul kesadaran akan perlunya suatu perubahan dalam suatu program belajar dengan waktu ketika perubahan tadi benar-benar dilaksanakan.

Perlunya strategi belajar inovatif dikarenakan masalah-masalah yang dihadapi sekarang dan di masa depan bersifat saling berkaitan atau berbentuk jaringan-jaringan yang kompleks. Selanjutnya, segenap persoalan atau permasalahan di masa depan akan terselesaikan melalui tindakan bersama (*cooperative action*). Apabila pendidikan terlalu mengandalkan strategi belajar memelihara, maka hasilnya lebih mengutamakan adanya persaingan daripada kebersamaan; lebih banyak melahirkan kemampuan menyusun solusi alih-alih kemampuan melakukan aksi.

Sementara itu, dalam strategi belajar inovatif terdapat dua aspek kegiatan belajar, yaitu *antisipasi dan partisipasi*. Perilaku yang inovatif hanya

akan timbul kalau terdapat kemampuan untuk berantisipasi, yakni kemampuan untuk memperkirakan secara sistematis dan realistis apa yang mungkin akan terjadi. Inovasi muncul sebagai hasil dari persiapan-persiapan untuk menyambut apa yang diperhitungkan akan terjadi tadi. Sebaliknya, setiap pola perilaku baru hanya akan berdampak inovatif dalam masyarakat apabila dilaksanakan oleh sebanyak mungkin anggota masyarakat; atau apabila setiap anggota masyarakat turut berpartisipasi dalam usaha menyesuaikan diri dengan tuntutan-tuntutan zaman. Dengan pernyataan lain, antisipasi mendorong lahirnya solidaritas dalam waktu, sedangkan partisipasi menciptakan solidaritas dalam ruang.

Delors, *et al.* (1996) memperluas makna strategi makro pendidikan yang dimaksud ke dalam bentuk empat pilar pendidikan, yakni: (1) *learning to know*; (2) *learning to do*; (3) *learning to live together, learning to live with others*; dan (4) *learning to be*.

Learning to know merupakan pilar pertama yang akan menyangga individu untuk menguasai perangkat-perangkat pemahaman. Tipe belajar inipun dapat dihargai, baik sebagai suatu awal maupun tujuan di dalam kehidupan. Sebagai suatu awal, melalui belajar ini setiap individu dipersiapkan untuk memahami pelbagai kesulitan tentang lingkungan hidupnya, mengembangkan keterampilan-keterampilan kerja dan komunikasi. Sebagai suatu tujuan, *learning to know* merupakan dasar untuk menyenangkan pemahaman, pengetahuan dan penemuan.

Learning to do sebagai pilar kedua tidak hanya bermakna belajar untuk melakukan tugas pekerjaan yang perhatiannya diberi upah dengan segera. Secara umum, individu diupayakan untuk menguasai pelbagai kompetensi dan keterampilan dalam menghadapi dan menangani situasi yang bervariasi, bekerja di dalam suatu tim, dan kaya akan pengalaman bekerja di pelbagai konteks jaringan.

Learning to live together merupakan pilar pendidikan yang senafas dengan belajar untuk hidup bersama orang lain yang beragam. Tipe belajar seperti ini merupakan isu umum dalam pendidikan dewasa ini, apalagi bila dikaitkan dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara yang majemuk seperti Indonesia. Melalui tipe belajar untuk hidup bersama, individu seyogianya dikembangkan pemahamannya tentang orang lain, sejarah, kebiasaan-kebiasaan, dan nilai-nilai spiritual yang melandasi mereka dalam menciptakan semangat baru dalam kehidupan yang saling bergantung, penuh risiko dan tantangan masa depan. Sudah barang tentu, pembelajaran yang menggunakan strategi dinamika kelompok sangat diapresiasi dalam hal ini.

Dalam konteks pendidikan berwawasan kebangsaan, belajar hidup bersama orang lain yang berbeda di samping matra paham kebangsaan, terlingkup pula rasa kebangsaan yang merupakan manifestasi dari nilai perdamaian serta semangat kebangsaan atau nilai demokrasi (UNESCO-APNIEVE, 2000). Dengan kata lain, pendidikan yang berwawasan kebangsaan senafas pula dengan pendidikan nilai untuk perdamaian, hak asasi manusia dan demokrasi.

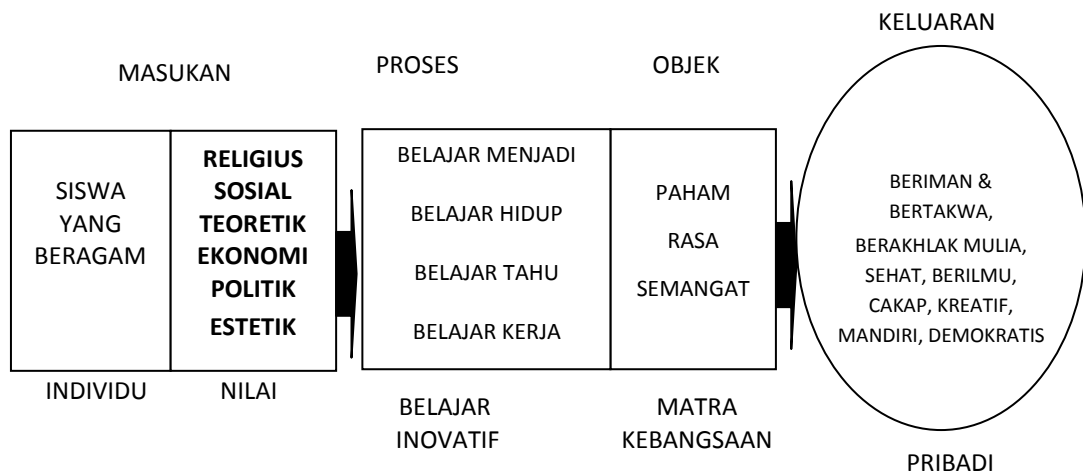
Pilar yang keempat adalah *learning to be* atau belajar menjadi. Tipe belajar ini diupayakan untuk mengembangkan kepribadian individu dan kemampuan untuk bertindak lebih mandiri, mempertimbangkan serta tanggung jawab pribadi. Dalam konteks pemikiran ini, *learning to be* dapat dikatakan sebagai pendidikan akhlaqul karimah yang menjembatani silaturahmi antara manusia dengan alam, sesamanya dan dengan Tuhannya.

d. Visualisasi Strategi Pendidikan dan Bimbingan dan Konseling Berwawasan Kebangsaan

Pada prinsipnya konsep pendidikan berwawasan kebangsaan terintegrasi dalam praksis dan fungsi pranata pendidikan yang mengembangkan sumberdaya manusia yang bermutu. Artinya, pendidikan yang berwawasan kebangsaan tidak terpisahkan atau merupakan bagian integral dari pendidikan yang diarahkan kepada pengembangan sumberdaya manusia yang berbekal nilai-nilai kehidupan yang potensial, sehingga teraktualisasikan melalui proses belajar menjadi, belajar hidup, belajar tahu dan belajar kerja serta konsisten menginternalisasi nilai paham, rasa dan semangat kebangsaan Indonesia. Individu yang beragam sebagai masukan yang potensial, melalui praksis pendidikan diharapkan menjadi pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berpartisipasi, pelajar efektif dan pribadi pekerja yang produktif.

Setiap nilai kehidupan yang potensial dalam diri individu merupakan kerangka acuan untuk bertindak dalam meraih masa depan dengan berhasil, asalkan satu nilai tidak menguasai nilai lainnya, dan gerakan nilai-nilai sudah sepantasnya berlangsung secara seimbang, sehingga nilai satu dapat mengendalikan nilai yang lainnya (Judistira K. Garna & Ade Makmur K., 1999).

Pendidikan berwawasan kebangsaan yang terintegrasi dalam pengembangan sumberdaya manusia yang bermutu dapat divisualisasikan sebagai berikut:

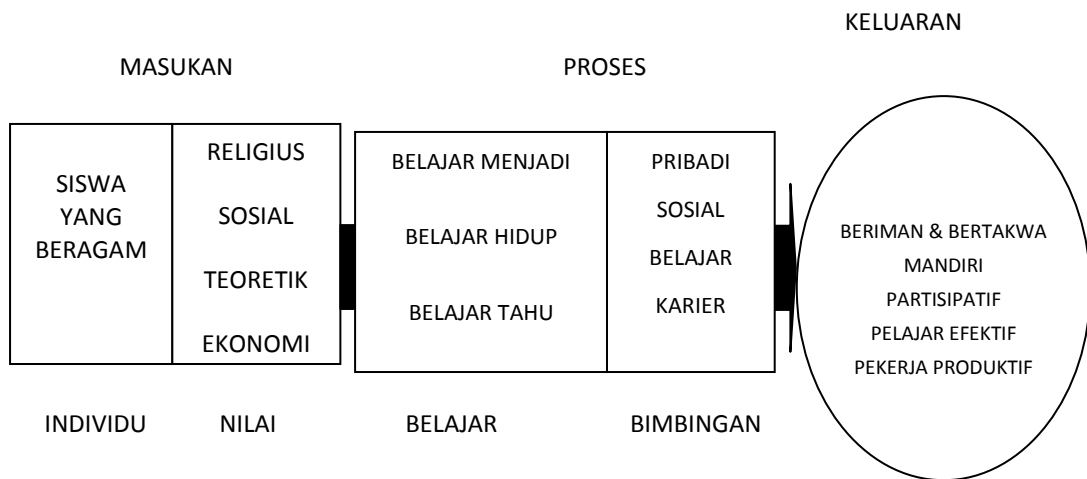


GAMBAR 1
STRATEGI PENDIDIKAN BERWAWASAN KEBANGSAAN

Gambar 1 di atas merupakan strategi makro pendidikan yang dapat diterjemahkan ke dalam strategi mikro bimbingan dan konseling, baik dalam lingkup layanan bimbingan pribadi, sosial, belajar, maupun karier.

Unsur masukan utama dalam strategi bimbingan dan konseling berwawasan kebangsaan adalah siswa yang beragam (setiap individu memiliki karakteristik yang khas), yang berbeda dengan pandangan bahwa individu itu seragam (semua sama). Oleh karena itu, keragaman layanan harus tersedia dalam program bimbingan dan konseling, guna memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan siswa yang beragam itu.

Secara visual strategi bimbingan dan konseling yang dimaksud adalah sebagai berikut.



GAMBAR 2
STRATEGI BIMBINGAN DAN KONSELING BERWAWASAN KEBANGSAAN

Unsur masukan dalam strategi bimbingan dan konseling berwawasan kebangsaan adalah peserta didik (siswa) yang beragam latar belakang serta karakteristik nilai-nilai yang dimilikinya. Mereka dibantu untuk belajar inovatif melalui bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karier hingga mencapai pribadi beriman dan bertakwa, mandiri, gemar berperanserta dalam kehidupan sosial, gemar belajar, dan mencapai pribadi pekerja yang produktif.

DAFTAR PUSTAKA

- Alisjahbana, S. T. (1986). *Essay of a New Anthropology; Values as Integrating Forces in Personality, Society and Culture*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Arredondo, P., Psalti, A., & Cella, K. (1993). "The Woman Factor in Multicultural Counseling." *Counseling and Human Development*, 25, (8), 1-8.
- Botkin, J.W., Elmandjra, M., & Malitza, M. (1979). *No Limits To Learning*. New York: Pergamon Press.
- Buchori, M. (1987). Mendidik Masyarakat Menyongsong Fase Lepas-Landas dan Masa Depan Bangsa, (*Makalah Seminar Nasional*). Bandung: IKIP.
- Carter, R. T. (1991). "Cultural Values: A Review of Empirical Research and Implications for Counseling." *Journal of Counseling and Development*, 70, (1), 164-173.
- Delors, J. et. al. (1996). *Learning: The Treasure Within*. Paris: UNESCO.
- Drake, C. (1989). *National Integration in Indonesia; Patterns and Policies*. Honolulu: University of Hawaii Press.

- Fukuyama, M. A. (1990). "Taking a Universal Approach to Multicultural Counseling." *Counselor Education and Supervision*, 30, 6-17.
- Furqon, dkk. (2000). *Studi Tentang Pelaksanaan Program Pembauran di Bidang Pendidikan*. Bandung: Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Garna, J. K., & Ade M. K. (1999). *Persatuan dan Kesatuan Bangsa: Suatu Renungan Pembentukan Indonesia Merdeka Ke Arah Kebudayaan Kebangsaan*. Bandung: Primaco Akademika, c.v.
- Hansen, L. S. (1997). *Integrative Life Planning; Critical Tasks for Career Development and Changing Life Patterns*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Inkeles, A. (1983). "Modernisasi Manusia", dalam Myron Weiner (Ed). *Modernisasi; Dinamika Pertumbuhan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jarvis, P. (1992). *Paradoxes of Learning; On Becoming an Individual in Society*. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- Kartadinata, S. (2000). "Pendidikan untuk Pengembangan Sumberdaya Manusia Bermutu Memasuki Abad XXI: Implikasi Bimbingannya." *Psikopedagogia*, 1, (1), 1-12.
- Koentjaraningrat. (1993). "Manusia Indonesia Bermutu." *Kompas*, Kamis-Jumat, 19-20 Agustus 1993, halaman 4 dan 5.
- Marzurek, K., Winzer, M. A., & Majorek, C. (Eds.) (2000). *Education in a Global Society; A Comparative Perspective*. Boston: Allyn and Bacon.
- Palmer, Stephen & Laungani, Pittu. (2008). *Counseling in a Multicultural Society*. London : Sage Publisher.
- Qamarulhadi, S. (1986). *Membangun Insan Seutuhnya*. Bandung: Alma'arif.
- Rahardjo, M. D. (Ed.) (1987). *Insan Kamil; Konsepsi Manusia Menurut Islam*. Jakarta: Pustaka Grafitipress.
- Sallis, E. (1993). *Total Quality Management in Education*. Philadelphia, London: Kogan page Limited.
- Sardar, Z. (1979). *The Future of Muslim Civilization*. London: Croom Helm. A.b. Rahmani Astuti (1993). *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*. Bandung: Mizan.
- Supriadi, D. (2001). *Konseling Lintas-Budaya: Isu-isu dan Relevansinya di Indonesia. (Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Supriatna, M. dkk. (2003). *Implementasi Pendidikan Berwawasan Kebangsaan*. (Laporan). Kerjasama Fakultas Ilmu Pendidikan, UPI dengan Direktorat Sekolah Lanjutan Pertama, Ditjen Dikdasmen, Departemen Pendidikan Nasional.
- Supriatna, M. (2003). *Strategi Bimbingan dan Konseling Berwawasan Kebangsaan Untuk Mengembangkan Sumberdaya Manusia Bermutu Dalam Masyarakat Yang Majemuk*. (Kertas Kerja). Bandung: Konvensi Nasional XIII Bimbingan dan Konseling, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.

- Supriatna, M. & Nurihsan, J. (Eds). (2005). Pendidikan dan Konseling di Era Global; Dalam Perspektif Prof. Dr. M. Djawad Dahlan. Bandung: rizqi press.
- Surjomihardjo, A. (1980). *Budi Utomo Cabang Betawi*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: CV. Eko Jaya.
- Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Sistem Pendidikan Nasional) 2003 Beserta Penjelasannya*. Bandung: Fokusmedia.
- Unesco-APNIEVE. (2000). *Belajar untuk Hidup Bersama dalam Damai dan Harmoni*. Bangkok: Kantor Prinsipal Unesco untuk Kawasan Asia-Pasifik & Universitas Pendidikan Indonesia.
- Ward, B. (1982). *Nationalism and Ideology*; a. b. Daniel Prasetyo, *Manusia dalam Kemelut Ideologi*. Bandung: Iqra.
- Yagi, D. T. (1998). *Multicultural Counseling and the School Counselor*. [Online]. Tersedia di <http://ericass.uncg.edu/virtuallib/diversity/1064.html>. [26 September 2001].